

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA  
KABUPATEN MESUJI 2017  
(Studi di Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji)**



**SEKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Studi Agama



Oleh

**EDI SUPRIONO  
NPM : 1331040027**

**Jurusan : Pemikiran Poitik Islam**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1438 H / 2018 M**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA  
KABUPATEN MESUJI 2017  
(Studi di Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji)**

**SEKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Studi Agama

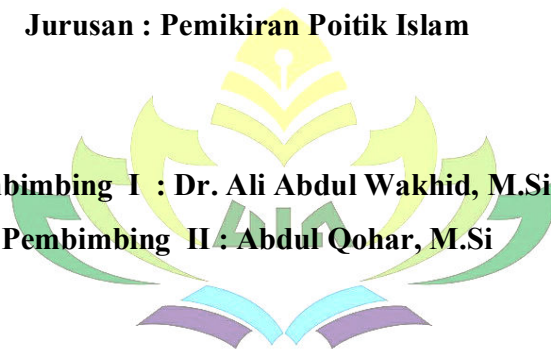
**Oleh**

**EDI SUPRIONO  
NPM : 1331040027**

**Jurusan : Pemikiran Poitik Islam**

**Pembimbing I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si**

**Pembimbing II : Abdul Qohar, M.Si**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1438 H / 2018 M**

**ABSTRAK**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA**

**KABUPATEN MESUJI 2017**

**(Studi di Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji)**

**Oleh**

**Edi Supriono**

Pemilu merupakan pintu gerbang untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mendapat legitimasi luas dari masyarakat. Pemilu merupakan kepentingan masyarakat dalam menentukan pemimpin/wakil di masing-masing tingkatan (*level*). Hal ini membutuhkan partisipasi masyarakat yang ada di level tersebut dalam proses dan praktik politik. Partisipasi ini disebut partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan fakta di lapangan permasalahan dari pemilu kepada daerah kecamatan panca jaya kabupaten Mesuji lampung dari tahun 2012 golput dan suara tidak sah mencapai 389 jiwa atau 13.8 % dan pemilu kepala daerah tahun 2017 meningkat golput dan suara tidak sah mencapai 599 jiwa atau 20.4% meningkat 7,4% angka golput atau suara tidak sah .Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah faktor apakah yang menyebabkan turun nya partisipasi masyarakat dalam pilkada kecamatan Panca Jaya kabupaten Mesuji dan bagaimana solusi nya untuk mengatasi masalah penurunan partisipasi masyarakat dalam pilkada Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pemilu dan memebrikan solusi untuk mengatasi masalah penurunan partisipasi masyakarakat dalam pemilu, khusus nya di wilayah kabupaten Mesuji. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel research*). Penelitian ini analisi dan empiris, dimana peneliti berusaha menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta apa adanya (*fac finding*) serta menentukan korelasi antara satu dengan lainnya, yang kemudian di analisis dengan menggunakan kaidah yang berlaku.Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara mendalam yang di lakukan peneliti terhadap responden, di peroleh data bahwa sebagian masyarakat kurang berminat mengikuti kampanye karna merasa kurang penting. Sebagian besar menganggap bahwa memilih merupakan hak masing-masing perorangan sehingga setiap orang bebas memilih sesuai keinginan meraka tanpa di pengaruhi orang lain, sebagian besar responden tidak menjadi panitia dalam pilkada Mesuji 2017 hal itu di sebabkan karena kesempatan menjadi panitia dalam pilkada sendiri memang terbatas, sebagian besar masyarakat tidak berpartisipasi politik dalam bentuk menjadi tim sukses salah satu pasangan calon Kepala Daerah.

**Motto**

الْوَقْتُ كَالسَّيْفِ إِنْ لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَعَكَ

“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya  
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”  
(H.R. Muslim)





## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan motivasi dan semangat selama penulis menuntut ilmu :

1. Bapak Sumari dan Ibu Supriatun selaku kedua orang tua yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih nya serta membesarkan dan mendidik penulis sampai akhirnya bisa menyelesaikan S1
2. Kepada keluarga besar ku yang tercinta dan adik-adik keponakan Arsyla imanda rahel, Puput Pujilestari, Sifa Safitri, yang telah memberikan senyum semangat dan motivasi lebih untuk penulis. Untuk Arisetianingsih yang selalu memberikan semangat selama penulis berkuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk sahabat-sahabat PPI kelas A dan B serta angkatan 2013 yang selalu menyemangati satu sama lainnya selama penulis menempuh pendidikan dan belajar bersama sahabat-sahabat semua nya dan khusus nya teman-teman Mesuji seangkatan dan satu perjuangan trimakasih banyak selalu memberikan dukungan kepada penulis. serta untuk adik-adik tingkat yang memberikan motivasi dan senyum semangat nya
4. Untuk sahabat-sahabat senior dan junior OPLOZ FC USHULUDDIN FC yang selalu memberikan hiburan canda dan tawa, kemenangan dan kekalahan bersama, juara bersama semoga tetap LOYALTY MY TEAM

5. Untuk Almamater tercinta UIN raden intan lampung dan sahabat-sahabat KKN 157 Pekon gemah ripah yang telah memberikan pengalaman yang berharga selama KKN.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis lahir pada tanggal 07 juli 1994 anak kesatu dari pasangan bapak Sumari dan ibu Supriatun. Pada 2000 penulis bersekolah di SDN 01 Tanjung serayan lulus pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan ke SMP N 01 Mesuji timur pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan ke SMA N 01 simpang pematang pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang yang lebih yaitu di UIN Raden Intan lampung Fakultas Ushuluddin jurusan Pemikiran Politik Islam pada tahun 2013 Kemudian penulis menyelesaikan S1 pada tahun 2018.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Azza Wajalla yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, Solawat seiring salam semoga tetap kita limpahkan kepada sosok tauladan dan Peimpin sejati yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dinantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti.

Dibalik terselesaikannya skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilma pengetahuan dikampus tercinta.
2. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Dr. Nadirsah Hawari, MA selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam, dan Ibu Tin Amalia Fitri, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam.
4. Bapak Dr.Ali Abdul Wakhid, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Qohar, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah ikhlas memberikan ilmu dan wawasan selama megikuti perkuliahan.

6. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan beserta Staf, yang turut memberikan data berupa literature sebagai sumber dalam penulisan Skripsi ini.
7. Karyawan dan karyawan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kelancaran penulis sehingga selesainya penulisan Skripsi ini.
8. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
9. Kepada kawan-kawan squad kocak Akbar dwianto, riki firmansah, Bagus setiadi, Heriandanurfa, Afen sandika, Kirwanto, Beni iswanto, Rahmad hidayat, M.alfat, Yogi alhafiz saya ucapkan terima kasih sudah memberikan dukungan kepada penulis selama penulis mengerjakan skripsi ini.

Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahannya, hal ini diharapkan saran dan kritik dari pembaca sehingga skripsi ini dapat tersusun lebih baik dan lebih sempurna.

Semoga amal dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan di bidang politik khususnya pada Jurusan Pemikiran Politik Islam.

Bandar Lampung, Januari 2018  
Penulis,

Edi supriono

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAM PENGESAHAN .....	iii
MOTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Metode Penelitian .....	10
H. Tinjauan Pustaka .....	12

### BAB II PERAN PARTISIPASI MASYRAKAT DALAM PILKADA KABUPATEN MESUJI

A. Partisipasi Masyarakat .....	15
1. Pengertian Partisipasi .....	15
2. Partisipasi Masyarakat .....	18
3. Prinsip-prinsip Partisipasi .....	20
4. Bentuk dan Tipe Partisipasi .....	21
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi .....	24
6. Macam-macam Partisipasi dalam Masyarakat .....	26

7. Tingkatan Partisipasi .....	28
B. PILKADA .....	29
1. Pengertian Tentang Pemilu .....	29
2. Pengertian Pemilukada .....	32
3. Pelaksanaan Pemilukada .....	36

### **BAB III                    UMUM MASYARAKAT DI KECAMATAN                    PANCA JAYA KABUPATEN MESUJI GAMBARAN**

A. Kondisi Umum Kecamatan Panca Jaya .....	38
1. Sejarah Singkat Kecamatan Panca Jaya .....	38
2. Struktur Organisasi Dan Daftar Pegawai Kecamatan Panca Jaya .....	39
3. Gambaran Wilayah .....	40
4. Potensi Wilayah .....	42
5. Visi Misi Kecamatan Panca Jaya Kecamatan Mesuji .....	43
6. Sosial Kemasyarakatan .....	43
B. Partisipasi Politik Masyarakat terhadap Pilkada .....	45
C. Metode Penelitian .....	48

### **BAB IV                    FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA**

A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Turunnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji .....	55
B. Solusi Untuk Mengatasi Masalah Penurunan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji.....	73

### **BAB V                    PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Penutup .....	81

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Judul ini merupakan salah satu bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul adalah sebagai pemberi arah serta dapat memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung di dalamnya. Demikian juga halnya dengan skripsi ini berjudul : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA KABUPATEN MESUJI 2017 (Studi di Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji).

Untuk lebih memahami pengertian dan maksud dari judul tersebut di atas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyimpangan pemahaman judul skripsi ini, antara lain adalah :

Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.



Secara umum, Pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab dengan kata "*syaraka*". *Syaraka*, yang artinya ikut serta (berpartisipasi). Sedangkan dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan "*society*" yang pengertiannya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Untuk mengamati lebih luas mengenai pengertian masyarakat, mari kita mengkaji beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian masyarakat.<sup>1</sup>

Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut PILKADA atau Pemilukada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Pengertian Lain tentang Pilkada adalah Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian maksud dari judul skripsi ini secara keseluruhan adalah partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi melalui proses

---

<sup>1</sup> Muin Idianto, *Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta : Erlangga, 2013) h. 25

desentralisasi Pilkada yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif Kabupaten Mesuji tahun 2017 secara adil dan jujur.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Beberapa alasan yang mendasari penulis memilih judul dalam penelitian ini adalah karena:

1. Pemilu merupakan kepentingan masyarakat dalam menentukan pemimpin/wakil di masing-masing tingkatan dan ini membutuhkan partisipasi masyarakat dalam proses serta praktik politik.
2. Pentingnya partisipasi masyarakat di kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji dalam mensukseskan Pemilu untuk menekan suara golput dan suara tidak sah.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Pemilu merupakan pintu gerbang untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mendapat legitimasi luas dari masyarakat. Jika pemilu dilaksanakan secara demokratis, adil, jujur langsung dan rahasia, maka terwujudnya pemilu yang berkualitas sangat tergantung bagaimana tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara baik. Tahapan tersebut meliputi; perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.<sup>2</sup>

Seiring dengan semangat penyelenggaraan pemilu yang demokratis, maka pemilu adalah suatu kementerian dari suatu lembaga yang sangat vital untuk

---

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992) h.28

demokrasi. Suatu pemilihan yang bebas berarti bahwa dalam suatu jangka waktu tertentu rakyat akan mendapat kesempatan untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diikuti oleh negara dan masyarakat dan terhadap orang-orang yang harus melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Dalam rangka terwujudnya tata susunan masyarakat yang dijiwai oleh cita-cita Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tersebut dalam Pancasila dan UUD 1945, maka penyusunan tata kehidupan itu harus dilakukan dengan jalan pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum itu tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja dan juga tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru dengan falfasafah negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat (aspirasi) dalam melaksanakan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber pada proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi amanat penderitaan rakyat.<sup>3</sup>

Ada baiknya peran masyarakat untuk mengubah mindset / pola pikir masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam PEMILU di 2017, akan tetapi bila masyarakat hanya terfokus oleh satu titik itu maka pemikiran seperti itu hanya akan memperkecil ruang lingkup masyarakat di dalam kehidupan bernegara.

---

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Liberty, 1993), h.158

Peran masyarakat adalah sebagai *Agent of Change*, Mereka harus mampu membawa perubahan, baik itu dalam tingkat bawah maupun tingkat pusat. Mereka tidak hanya membawa masyarakat dan menyadarkannya untuk memilih sosok pemimpin yang baik, jujur dan bertanggung jawab, tetapi mereka juga harus mampu membawa perubahan dalam struktur politik yang ada. Ketika sosok pemimpin yang muncul dalam panggung politik memang dinilai tidak layak dan kemudian minat masyarakat menjadi berkurang terhadap partisipasi politik, maka alangkah baiknya bila kita berfikir bagaimana merubah struktur politik dalam merekrut calon-calon pemimpin yang sesuai untuk memimpin bangsa ini.<sup>4</sup>

Pemilu diselenggarakan untuk menghindari terjadinya kekuasaan yang terpusat pada sekelompok orang tanpa mekanisme konstitusi yang jelas, sehingga ada kompetisi rasional, obyektif dan siap menang dan demikian juga siap kalah menjadi rakyat biasa. Oleh karena itu pemilihan umum merupakan salah satu sarana yang harus diadakan dalam negara demokrasi, untuk itu pemilu tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi atau menimbulkan penderitaan rakyat melainkan harus menjamin suksesnya pemilihan umum. Suatu pemilihan umum yang demokratis pada prinsipnya harus mencerminkan aspirasi serta kepentingan masyarakat, oleh sebab itu maka asas-asas pemilu; langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil harus dilaksanakan dengan baik.

---

<sup>4</sup> [http://www.kompasiana.com/awaludin.jamilah/peran-mahasiswa-dalam-pemilihan-umum-2014\\_54f73f6ba33311b8128b464c](http://www.kompasiana.com/awaludin.jamilah/peran-mahasiswa-dalam-pemilihan-umum-2014_54f73f6ba33311b8128b464c)Pemilu

Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi, yang menjadikan kepentingan rakyat berasal dari rakyatnya itu sendiri dengan semboyan, “Dari Rakyat untuk Rakyat”. Salah satu kepentingan rakyat adalah adanya seorang pemimpin, baik di lingkungan terkecil hingga lingkungan yang lebih besar. Lingkungan terkecil barangkali Rukun Tetangga (RT) atau perkumpulan minor lainnya, sementara lingkungan terbesar adalah Negara, Presiden. Dalam dunia demokrasi, seorang pemimpin haruslah dipilih oleh orang-orang yang dipimpinnya. Pada lingkup yang besar, di Indonesia dikenal istilah Pemilihan Umum (Pemilu), yang di negeri ini terdapat 4 (empat) macam, yaitu Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah Tingkat II (Bupati/Walikota), Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I (Gubernur), dan Pemilihan Presiden (Pilpres).<sup>5</sup>

Pemilu merupakan kepentingan masyarakat dalam menentukan pemimpin/wakil di masing-masing tingkatan (*level*). Hal ini membutuhkan partisipasi masyarakat yang ada di level tersebut dalam proses dan praktik politik. Partisipasi ini disebut partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif maupun pasif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pemimpin dan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Fifth Edition, Editor: Jonathan Crowther (Toronto, Tokyo, Taipei, Singapore: Oxford University Press, 1995), h.309.

<sup>6</sup> Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), h. 183

Secara umum, pemilu disambut gembira oleh masyarakat di Indonesia, karena dalam pemilu tersebut, masyarakat dapat mengekspresikan kebutuhannya akan seorang pemimpin atau wakil yang mereka inginkan. Oleh karena itu, mereka bahu-membahu dalam mendukung dan mensukseskan calon pemimpin atau wakilnya agar terpilih. Akan tetapi di antara sebagian masyarakat ada juga yang acuh tak acuh terhadap proses pemilihan itu, bahkan tidak turut serta dalam pemilu yang diselenggarakan mereka ini dikenal dengan istilah golongan putih (golput).<sup>7</sup>

Berikut ini data jumlah suara hasil pemilu kepala daerah Kecamatan Pancajaya Kabupaten Mesuji Lampung tahun 2012

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Suara yang sah	2431 Jiwa	86.2 %
2	Suara tidak sah	23 Jiwa	0.8 %
<b>3</b>	<b>Golput</b>	<b>366 Jiwa</b>	<b>13 %</b>
	Jumlah	2820 Jiwa	100 %

Sumber KPU Kabupaten Mesuji

Jumlah suara hasil pemilu kepala daerah Kecamatan Pancajaya Kabupaten Mesuji Lampung tahun 2017

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Suara yang sah	2336 Jiwa	78.4 %
2	Suara tidak sah	41 Jiwa	1.4 %
<b>3</b>	<b>Golput</b>	<b>558 Jiwa</b>	<b>19 %</b>
	Jumlah	2935 Jiwa	100 %

Sumber KPU Kabupaten Mesuji

---

<sup>7</sup> KPUD Kabupaten Mesuji, *Laporan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2017* (Kabupaten Musuji: KPUD Kabupaten Musuji, 2016).

Terlihat permasalahan dari pemilu kepala daerah Kecamatan Pancajaya Kabupaten Mesuji Lampung dari tahun 2012 golput dan suara tidak sah mencapai 389 jiwa atau 13.8 %, dan pemilu kepala daerah tahun 2017 meningkat golput dan suara tidak sah mencapai 599 jiwa atau 20.4% meningkat 7,4% angka golput dan suara tidak sah.

Secara demografis, kecamatan Panca Jaya merupakan representasi dari masyarakat Kabupaten Mesuji keseluruhan. Kecamatan Panca Jaya masuk peringkat ke-3 DPT terbanyak di Kabupaten Mesuji pada tahun 2017 lalu, akan tetapi angka partisipasi publik dalam pemilu termasuk peringkat ke-4 dari yang paling rendah.<sup>8</sup>

Oleh karena itu kami melakukan penelitian mengenai partisipasi *public* dalam pemilu di wilayah kabupaten Mesuji. Penelitian ini mengambil judul: Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Kabupaten Mesuji 2017 (Studi di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini ingin mencari titik persoalan, tentang penyebab terjadinya penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dengan demikian, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> *Ibid* h.7

1. Faktor apakah yang menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji?
2. Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah penurunan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pemilu;
2. Memberikan solusi untuk mengatasi masalah penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu, khususnya di wilayah kabupaten Mesuji.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan bermanfaat untuk:

1. Memberikan gambaran mengenai bagaimana partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji dalam Pemilu;
2. Sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Panca Jaya khususnya, dan Kabupaten Mesuji pada umumnya, guna perbaikan strategi dan komunikasi kepada masyarakat bagi penyelenggaraan pemilu yang akan datang.



## G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).<sup>9</sup> Penelitian lapangan yang dimaksud adalah penelitian yang langsung terjun ke lapangan (lokasi penelitian). Lokasinya terletak di wilayah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Data dikumpulkan dengan pendekatan kuantitatif, melalui metode angket (kuesioner) kepada responden. Selain angket, untuk memperkuat temuan data, maka penelitian ini ditambah dengan wawancara langsung dengan responden.

Penelitian ini bersifat analisis empiris, di mana peneliti berusaha menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta apa adanya (*fact finding*) serta menentukan korelasi antara satu dengan lainnya, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan kaidah yang berlaku.<sup>10</sup> Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Panca Karya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Data diambil 2% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2017, yang kemudian diambil sampel.

Sumber data yang dianggap primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu data dari hasil angket yang diajukan dalam bentuk kuesioner. Sementara data sekundernya berupa dokumen-dokumen penting yang menunjang, seperti: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, Jumlah TPS, Jumlah responden, dan

---

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Cet Ke-7, Bandung: MandarMaju, 1986), h.81

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Edisi Revisi III Cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

aktifitas sosial politik masyarakat yang terkait dengan partisipasi politik. Selain itu, data sekunder juga merupakan data yang diambil dari hasil publikasi (pustaka).

Selanjutnya, untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

#### 1. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan seorang analis untuk mengumpulkan data dan pendapat dari para responden yang telah dipilih. Daftar pertanyaan ini kemudian dibagikan kepada para responden yang akan mengisinya sesuai dengan pendapat mereka. Metode *Purposive Random Sampling*, digunakan untuk menghemat tenaga, biaya dan waktu, yakni teknik pengambilan sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Sampel diambil dengan pertimbangan bahwa seseorang atau sesuatu itu memiliki informasi yang diperlukan dan dapat mewakili sebagai besar populasi di sekitarnya.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isu, tema atau topik tertentu. Wawancara dilakukan dengan cara bertanya-jawab secara lisan langsung kepada orang

yang bersangkutan. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data tambahan dan memperkuat hasil kuesioner dalam penelitian ini.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan, dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.<sup>11</sup>

### 3. Dokumentasi

Sebagai objek yang di perhatikan dalam memperoleh informasi, kita mempersatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper) tempat (place) dan kertas atau orang (people). Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan ini lah kita telah menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumentasi yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumntasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulilas seperti buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan.

## H. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa hasil penelitian yang dapat dimunculkan di sini, antara lain:

---

<sup>11</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.274

*Pertama*, “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi kasus di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”. Penelitian ini adalah penelitian yang berupa Skripsi yang ditulis oleh Syaiful Huda, Mahasiswa S-1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah pada tahun 2014. Dalam hal ini, Syaiful Huda menyimpulkan bahwa respon masyarakat dalam pemilukada, cenderung menerima *money politic*. Meski demikian, sebagian mereka juga tetap ingin berpartisipasi meskipun tidak ada praktek money politik. Jika dilihat lebih jauh, partisipasi masyarakat dalam pemilukada dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 1) faktor hubungan masyarakat dengan calon (4%), faktor money politic (76%), faktor kondisi sosial ekonomi (16%) dan faktor sosial politik (4%).

Penelitian ini cukup representative untuk dijadikan sebagai gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilu, baik pemilukada, pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Akan tetapi, tentu saja berbeda dengan situasi dan kondisi masyarakat serta kecenderungan masyarakat Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.

*Kedua*, “Partisipasi Politik Siswa MAN II Yogyakarta Dalam Pemilukada Tahun 2011 Di Kota Yogyakarta”. Pustaka ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Laelah Kodariah pada tahun 2012. Dalam hal ini, Laelah melaporkan bahwa siswa MAN II Yogyakarta ikut berpartisipasi dalam Pemilukada. Bentuk partisipasi politik yang diikuti siswa diantaranya melakukan pemilihan,

kampanye, bergabung dengan kelompok kepentingan. Sebagai bentuk partisipasi publik, data penelitian ini cukup memberikan gambaran mengenai bagaimana seharusnya masyarakat turut serta dalam pemilu. Mensosialisasikan program KPU, calon, mengawasi kecurangan pemilu secara mandiri, dan ikut dalam pemilihan, merupakan cara-cara yang baik dalam berpartisipasi. Akan tetapi, paling tidak, hadir dalam pemilihan dan ikut memilih, sudah cukup sebagai bentuk partisipasi.

Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan indikator partisipasi masyarakat dalam pemilu. Melalui kedua hasil penelitian (bahan pustaka) di atas, dapat dilihat bahwa keduanya memang berbicara tentang peran masyarakat dalam pemilu.



## BAB II

### PERAN PARTISIPASI MASYRAKAT DALAM PILKADA KABUPATEN MESUJI

#### A. Partisipasi Masyarakat

##### 1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.<sup>12</sup>

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Partisipasi juga memiliki pengertian *“a valuentary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them”* (Deepa Naryan, 1995), artinya suatu proses yang wajar di mana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku,

---

<sup>12</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002)  
h. 39

pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Huntington, di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.<sup>13</sup>

Huntington membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- b. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
- c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung artibahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.

---

<sup>13</sup> Huntington. P, Samuel. Nelson, Joan., *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.201

- e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.<sup>14</sup>

Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi sebagai berikut:

- a. partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal;
- b. bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut;

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h.202



- c. bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.<sup>15</sup>

## **2. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h.209

- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak masyarakat.
- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- d. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental
- e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan.<sup>16</sup>

Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

---

<sup>16</sup> Miriam Budiarjo., *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2002), h. 34-35

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

### **3. Prinsip-prinsip Partisipasi**

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) adalah:

- a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- c. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.

- d. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*Sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- f. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.<sup>17</sup>

#### **4. Bentuk dan Tipe Partisipasi**

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

---

<sup>17</sup> Ambo Upe., *Sosiologi Politik Kontemporer* (Jakarta: Prestasi Pustakarya 2008), h.124

Dari berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna

mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.

Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Partisipasi terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non fisik dan partisipasi fisik”. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha-

usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.

## **5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan



dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

e. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.<sup>18</sup>

## 6. Macam-macam Partisipasi dalam Masyarakat

Partisipasi menjadi empat jenis, yaitu

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi,

---

<sup>18</sup> Ambo Upe, *Sosiologi Politik Kontemporer* (Jakarta: Prestasi Pustakarya 2008), h.126-127

sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.<sup>19</sup>

Ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi:

- a. Menggerakkan sumber daya dan dana.
- b. Kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.
- c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa

---

<sup>19</sup> Huntington. P, Samuel. Nelson, Joan, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta 1990), h.209

dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- d. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.<sup>20</sup>

## 7. Tingkatan Partisipasi

Partisipasi berdasarkan tingkatannya dapat dibedakan menjadi 7 tingkatan, yaitu :

- a. *Manipulation*, merupakan tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indoktrinasi.
- b. *Consultation*, yaitu dimana stakeholder mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan.
- c. *Consensus-building*, yaitu dimana pada tingkat ini stakeholder berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok. Kelemahan yang sering terjadi adalah individu-individu dan kelompok masih cenderung diam atau setuju bersifat pasif.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 210

- d. *Decision-making*, yaitu dimana konsensus terjadi didasarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggungjawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok.
- e. *Risk-taking*, yaitu dimana proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan, dan implikasi. Pada tahap ini semua orang memikirkan resiko yang diharapkan dari hasil keputusan. Karenanya, akuntabilitas merupakan basis penting.
- f. *Partnership*, yaitu memerlukan kerja secara equal menuju hasil yang mutual. Equal tidak hanya sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi dalam tanggung jawab.
- g. *Self-management*, yaitu puncak dari partisipasi masyarakat. Stakeholder berinteraksi dalam proses saling belajar (*learning process*) untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian.<sup>21</sup>

## **B. PILKADA**

### **1. Pengertian Tentang Pemilu**

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 213

dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.<sup>22</sup> Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

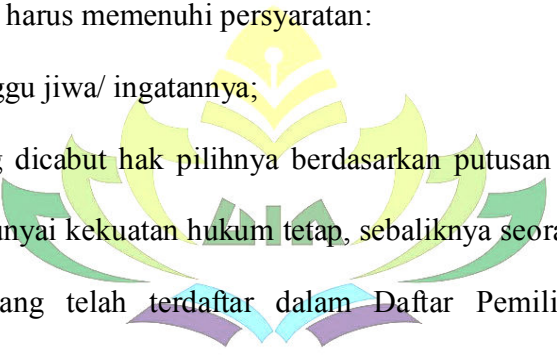
---

<sup>22</sup> Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, (Prisma Media, Jakarta, 2004), h: 29.

Pada azasnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih).

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.<sup>23</sup>

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

- 
- a. tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.<sup>24</sup>

Masalah dan gejolak seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data pemilih. Ada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ternyata tidak

---

<sup>23</sup> Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009), h. 168.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 168.

terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DPT. Sebenarnya masalah ini lebih bersifat teknis dan administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, masalah ini dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan gejolak dan konflik.

Berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan pemilih/ DPT ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya.
- b. Pemutakhiran data/ verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik.
- c. Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara aktif, agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).<sup>25</sup>

## **2. Pengertian Pemilukada**

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 169.

Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.<sup>26</sup>

Pemilukada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Propinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai Politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal.

- a. Sistem demokrasi langsung melalui pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan

---

<sup>26</sup> Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, h 44.



menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (oligarkis).

- b. Dari sisi kompetensi politik. Pemilu langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat berkompensi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pemilu langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan “*syndrome*” dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak *fair*, seperti; praktik politik uang (*money politics*).
- c. Sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di aras lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.
- d. Pemilu langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan *legitimate*. Karena, melalui

pemilukada langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, Pemilukada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat.

- e. Kepala daerah yang terpilih melalui pemilukada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (*check and balance*) di daerah antara kepala daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik.<sup>27</sup>

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 119 berisi prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung antara lain:

- a. Mekanisme dan prosedur pemilihan. Mekanisme ini meliputi seluruh tahapan pemilihan mulai dari penjurian bakal calon, pencalonan dan pemilihannya. Keterlibatan lembaga legislatif dan masyarakat dalam setiap tahapan tersebut diatur jelas dan tegas.
- b. Peranan DPRD dalam pemilihan Kepala Daerah. Dominasi peranan DPRD dalam Pemilukada seperti saat ini, tentu saja akan mengalami

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h.46

degradasi. Peranan DPRD tidak mengurangi fungsinya sebagai lembaga legislatif di daerah.

- c. Mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah. Perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah akan mempengaruhi mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah.
- d. Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan berpotensi menimbulkan resistensi terhadap hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD.
- e. Hubungan pelaksana pemilihan Kepala Daerah dengan pemilihan Presiden, anggota DPR, DPRD dan DPD. Dalam satu tahun, di suatu Kabupaten/ Kota, mungkin terjadi tiga kali pemilihan, yaitu Pemilu (presiden, DPR, DPRD), pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/ Walikota.

### **3. Pelaksanaan Pemilukada**

Proses pelaksanaan Pemilukada diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 65 dan 66, dimana dalam pasal 65 ayat (4) dikemukakan bahwa “masa persiapan Pemilukada diatur oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Daerah”. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan.

Pelaksanaan dalam tahap tersebut meliputi beberapa tahapan, yakni;

- a. Penetapan daftar pemilih;
- b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
- c. Kampanye;
- d. Pemungutan suara;
- e. Penghitungan suara; dan
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DI KECAMATAN PANCAJAYA KABUPATEN MESUJI**

### **D. Kondisi Umum Kecamatan Panca Jaya**

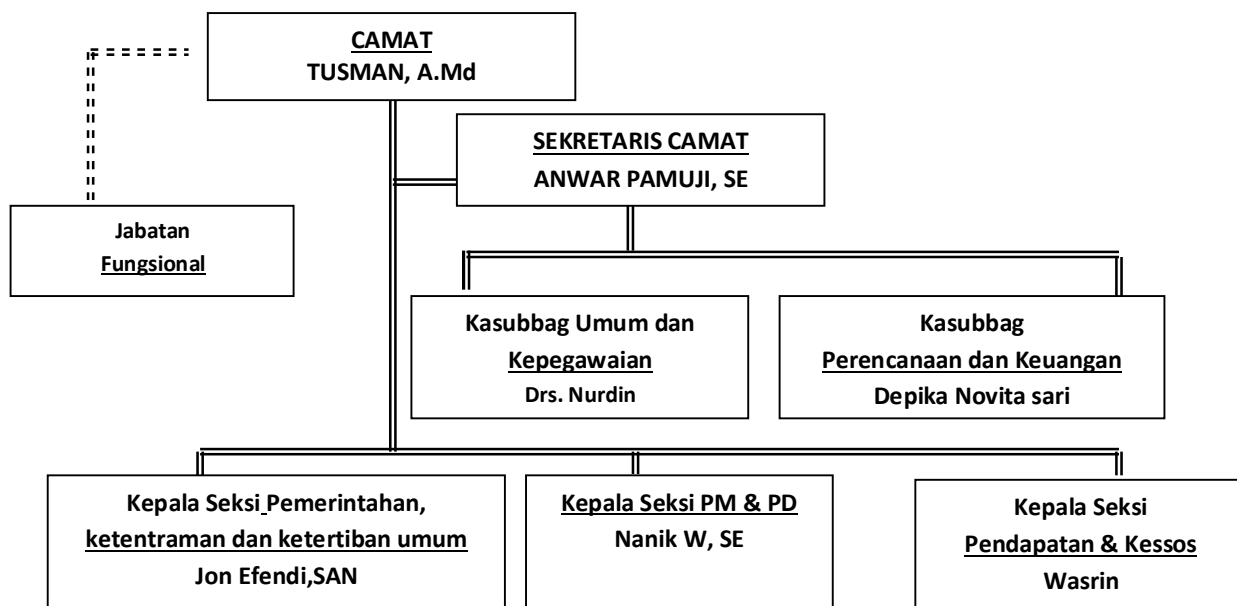
#### **1. Sejarah Singkat Kecamatan Panca Jaya**

Berdasarkan surat usulan Camat Simpang Pematang No. 136/138/SP/2006 tanggal 7 juni 2006 tentang pemekaran wilayah yaitu memekarkan kecamatan Simpang Pematang menjadi dua kecamatan yang terdiri dari kecamatan Simpang Pematang dan Kecamatan Panca Jaya. Kemudian pada tanggal 13 April 2007, DPRD Kecamatan Tulang Bawang mensahkan usulan pemekaran Kecamatan Panca Jaya tersebut.

Camat yang pernah memimpin kantor Camat panca jaya yaitu :

1. Zainal hidayat, SE Camat periode tahun 2007-2009
2. Gunarso, SH Camat periode tahun 2009-2011
3. Anca marta utama, S.STP, MM Camat periode tahun 2011-2012
4. Selamat Rianto, S.IP Camat periode tahun 2012 -2017
5. Drs. Ma'ruf,MM Camat Periode tahun 2017 s/d 17 Juli 2017
6. Tusman, A.Md Camat Periode Tahun 2017 s/d Sekarang

## 2. Struktur Organisasi Dan Daftar Pegawai Kecamatan Panca Jaya



No	Nama Pegawai	Jabatan	Gol/ Pangkat	Keterangan
1	TUSMAN, A.Md	CAMAT	III.d	PNS
2	ANWAR PAMUJI, SE	Sekretaris Camat	III.c	PNS
3	JON EFENDI, SAN	Kasi Tata Pemerintahan	III.c	PNS
4	NANIK WARSINI, SE	Kasi PM&Ekbang Desa	III.c	PNS
5	WASRIN	Kasi Pendapatan dan kessos	III.c	PNS
6	Drs. NURDIN	Kasubag	III.a	PNS

		Umum dan Kepegawaian		
7	YASIRUN	Staf	II.c	PNS
8	IMAM SUPINGI	Sekretaris Desa	II.a	PNS
9	KAWAN			TKS
10	WIDYAWATI			TKS
11	SITI HERTI NINGSIH			TKS
12	HERU JULIANTO			Pol PP
13	AGUS ISMANTO			Pol PP
14	RIKO SANJAYA			Pol PP

### 3. Gambaran Wilayah

#### a. Monografi Kecamatan

Nama Kecamatan : Panca Jaya

Ibu Kota Kecamatan : Panca Jaya

Jumlah desa : 7 desa

Jumlah Penduduk : 16.493 Jiwa

Luas Wilayah : 9.164,5 Ha

#### b. Batas-batas Wilayah

1) Sebelah Barat : Kecamatan Simpang Pematang

2) Sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Raya

3) Sebelah Selatan : Kecamatan Simpang Pematang

4) Sebelah utara : Provinsi Sumatra selatan

c. Orbitasi

1) Jarak ke Ibukota Kecamatan : 12 Km

2) Jarak ke Ibukota Propinsi : 200 Km

3) Jarak ke Desa terdekat : 0 Km

4) Jarak ke Desa terjauh : 6 Km

Data Desa yang ada di wilayah Kecamatan Panca Jaya adalah sebagai berikut :

a. Nama desa : Adi Luhur

Nama Kepala desa : Suharman

Jumlah Penduduk : 3.727 Jiwa

Luas Wilayah : 1.557,5 Ha

b. Nama desa : Adi Mulyo

Nama Kepala desa : Sulistiani

Jumlah Penduduk : 1.894 Jiwa

Luas Wilayah : 1.198,5 Ha

c. Nama desa : Fajar Baru

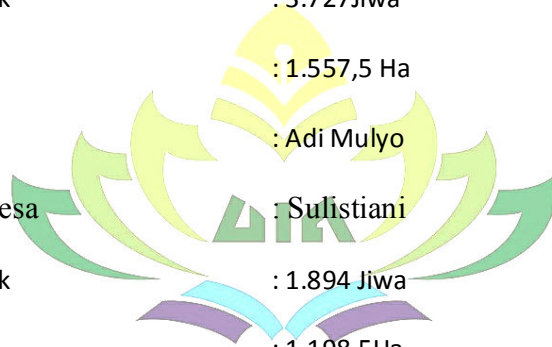
Nama Kepala desa : Apriyanto

Jumlah Penduduk : 3.520 Jiwa

Luas Wilayah : 1.664.5 Ha

d. Nama desa : Mukti Karya

Nama Kepala desa : Suyati





	Jumlah Penduduk	: 3.373 Jiwa
	Luas Wilayah	: 1.639 Ha
e.	Nama desa	: Adi Karya Mulya
	Nama Kepala desa	: Yasirun
	Jumlah Penduduk	: 1.111 Jiwa
	Luas Wilayah	: 754,5 Ha
f.	Nama desa	: Fajar Indah
	Nama PJ Kepala desa	: Tusman, A.Md
	Jumlah Penduduk	: 1.821 Jiwa
	Luas Wilayah	: 1.405,5 Ha
g.	Nama desa	: Fajar Asri
	Nama Kepala desa	: Anwar Pamuji, SE
	Jumlah Penduduk	: 1.047 Jiwa
	Luas Wilayah	: 945 Ha

#### 4. Potensi Wilayah

Tanaman kelapa sawit dan karet merupakan komoditas pertanian utama yang dihasilkan di Kecamatan Panca Jaya selain singkong dan padi. Adapun berbagai mata pencarian penduduk adalah :

- Usaha Pertanian
- Usaha Perkebunan Karet dan sawit
- Karyawan perusahaan
- Pedagang

- e. Usaha Industri kecil
- f. Buruh tani dan perkebunan

## **5. Visi Misi Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji**

**Visi :** *“Terwujudnya Masyarakat Yang Madani, Aman, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan”*

**Misi :** Misi pembangunan Kecamatan Panca Jaya :

- a. Menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial budaya, hukum, dan kehidupan politik demokrasi.
- b. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
- c. Mendayagunakan segenap potensi ekonomi daerah berdasarkan hukum.
- d. Melaksanakan manajemen pemerintahan yang berkualitas, transparan dan accountable.
- e. Melaksanakan pemerataan pembangunan berbasis masyarakat yang berkeadilan.

## **6. Sosial Kemasyarakatan**

- a. Menggiatkan penggalan dan pengembangan serta promosi potensi kelompok home industry melalui KUBE dan mengusulkan bantuan pada BKSPM Mesuji.
- b. Mensosialisasikan legalisasi pondok pesantren serta membantu pembuatan proposal izin oprasionalnya.
- c. Menggiatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kelembagaan sosial. Penataan dan penguatan lembaga Sosial kemasyarakatan.

- d. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan Sosial yang profesional dan berbasis masyarakat. Dilakukan melalui peningkatan kualitas manajemen pelayanan Sosial kemasyarakatan sehingga menurunkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- e. Meningkatkan kerukunan internal dan antar umat beragama sebagai keragaman potensi yang dapat dikembangkan dalam pembangunan masyarakat Panca Jaya.
- f. Meningkatkan pembangunan sarana rumah ibadah, sehingga peningkatan ketakwaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.
- g. Meningkatkan kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Strategi ini dilakukan dengan pembinaan lembaga sosial dan politik sehingga akan meningkatnya peran serta lembaga Sosial dan politik dalam membangun kehidupan masyarakat yang demokratis.
- h. Menggiatkan pemberdayaan masyarakat melalui LPM dan PKK
- i. Menggiatkan Pokjanal Posyandu dalam melayani kesehatan masyarakat
- j. Pelayan Posyantekdes pada kelompok-kelompok usaha
- k. Memotivasi pembangunan dan persiapan lomba kampung
- l. Menggiatkan Gotong royong
- m. Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan. Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas manajemen kependidikan sehingga akan meningkatnya

kualitas dan cakupan pelayanan pendidikan disemua jenjang pendidikan formal dan informal.

n. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik. Pengembang SDM tenaga pendidik akan meningkatkan profesionalisme guru ( sertifikasi ) meningkatkan jumlah guru layak mengajar dan di capai rasio siswa / guru persekolah mendekati ideal yaitu 40 siswa / guru.

o. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

p. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan formal dan non formal.

Tidak semua anak anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan formal sehingga perlu adanya perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi orang tidak mampu dalam menurunkan jumlah Angka Buta Aksara ( Meningkatnya Angka Melek Huruf > 95 % )

#### **E. Partisipasi Politik Masyarakat Masyarakat Terhadap Pilkada**

Dilihat dari penduduknya, Kecamatan Pancajaya merupakan kecamatan yang heterogen. Mereka terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, budaya, status sosial dan agama. Masyarakat di sini hidup rukun dan penuh kedamaian. Masing-masing memiliki kesibukan tersendiri, ada yang bekerja sebagai petani, peternak, nelayan, pedagang, pegawai negeri, pegawai swasta, pendidik, pelajar, dan lain sebagainya. Masing-masing profesi ini telah menenggelamkan mereka dalam kesibukan sehari-hari. Kondisi sosial mereka sangat baik, tidak ada catatan kekerasan dan penyimpangan-penyimpangan perilaku yang mengkhawatirkan.

Masyarakatnya masih hidup dalam gaya pedesaan, kendatipun berada di wilayah perkotaan. Gotong-royong, silaturahmi, dan saling membantu dalam setiap kegiatan kemasyarakatan masih sangat kental di daerah ini. Cinta damai dalam perbedaan merupakan prinsip kehidupan mereka. Kalaupun ada gesekan-gesekan, biasanya justru karena perbedaan pandangan dalam hal politik. Beda calon, cara sosialisasi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemilihan umum, memang cukup terasa, akan tetapi tidak sampai pada titik mengkhawatirkan. Umumnya saat kampanye saja hal itu terjadi, setelahnya, kondisi sosial masyarakat akan kembali seperti semula.

Berdasarkan data demografi di lingkup Kecamatan Pancajaya, maka masyarakat partisipan dapat dikelompokkan sebagai berikut: Petani, Peternak, Pedagang, Pegawai Negeri/Swasta, Pelajar/Mahasiswa, Pendidik (Guru/Dosen), Nelayan, Wiraswasta dan Buruh. Mereka ini ada yang ikut terafiliasi ke dalam organisasi/perkumpulan tersendiri ada pula yang tidak. Akan tetapi, pada umumnya masyarakat cukup berpartisipasi dalam pemilu di wilayah kecamatan Kecamatan Pancajaya tahun 2017, meskipun hanya sebatas datang dan memilih pada pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa responden, ada beberapa jenis kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam kaitannya pemilu, sebagai berikut:

a. Ikut Memilih

Untuk golongan ini, terdapat dua tipe partisipasi yaitu:

- 1) Ada masyarakat yang berpartisipasi dengan cara ikut memilih saja, menggugur hak dan kewajiban;
  - 2) Ada pula yang memilih karena memang memiliki tujuan dan harapan. Meskipun tidak banyak, ada juga yang memilih karena ada semacam intimidasi.
- b. Ikut menghadiri acara sosialisasi KPU
- Pada kelompok ini, juga terdiri dari 2 tipe partisipasi yaitu:
- 1) Ada yang ikut sosialisasi KPU saja, dan
  - 2) Ada juga yang memiliki tujuan dan harapan.
- c. Ikut menghadiri acara sosialisasi calon, baik anggota legislative maupun presiden/wakil presiden. Mereka ini ikut menghadiri acara sosialisasi calon, ada yang karena simpati ada yang karena memang ada tujuan tertentu.
- d. Ikut mensosialisasikan calon tertentu. Partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk mensosialisasikan calon tertentu, terjadi karena beberapa sebab:
- 1) karena menjadi tim sukses;
  - 2) karena simpati; dan,
  - 3) karena memiliki harapan dan tujuan.
  - 4) Ikut mempersiapkan sosialisasi calon tertentu. Ikut persiapan dan partisipasi aktif semacam ini, disebabkan oleh simpati dan punya harapan/target tertentu.
  - 5) Ikut membantu pendanaan calon tertentu.

Ada juga yang ikut membantu pendanaan. Umumnya karena memiliki tujuan dan harapan tertentu. Hal ini dapat dilihat dari siapa yang melakukan partisipasi semacam ini. Jika ia pengusaha, maka ada harapan untuk memperoleh

proyek tertentu jika berhasil nantinya. Jika ia orang biasa, terkadang karena simpati pada calon tersebut, dan seterusnya.

#### F. Metode Penelitian

Pada bab pendahuluan telah diungkapkan bahwa responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Pancajaya, yaitu yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Mesuji 2017. Penelitian telah dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 121 responden, untuk melengkapi perolehan data dari kuesioner dan untuk mendukung jawaban responden dalam kuesioner, dilakukan wawancara mendalam terhadap 11 responden yang terdiri dari kalangan pendidikan (guru sebanyak 2 orang, 2 PNS, 1 orang wiraswasta, 1 orang ibu rumah tangga, 1 orang perangkat desa, 1 orang anggota DPRD, 1 orang bidan, 1 orang mahasiswa, serta 1 orang petani. Di samping 11 responden tersebut, peneliti juga melakukan wawancara langsung terhadap 4 orang yang golput dalam Pilkada Kabupaten Mesuji 2017.

Data yang diperoleh mengenai responden yang mengisi kuesioner adalah sebagai berikut:

##### 1. Umur Responden

Responden dibedakan atas golongan muda (17 – 40 tahun) dan golongan tua ( $41 \geq 60$  tahun). Data mengenai umur responden dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL  
Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Persen
17 – 40 tahun	71	58.7 %
41 $\geq$ 60 tahun	50	41.3%
Total	121	100%

Sumber : Kuesioner

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah golongan muda. Dari 121 responden, jumlah golongan muda 21 orang lebih banyak (58,7%) daripada responden golongan tua (41,3%).

## 2. Jenis Kelamin Responden

Responden terdiri atas laki-laki dan perempuan. Data mengenai jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL  
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
Laki-laki	72	59.5 %
Perempuan	49	40.5%
Total	121	100%

Sumber : Kuesioner

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 121 responden, 72 diantaranya (59,5%) berjenis kelamin laki-laki, dan 49 orang (40,5%) adalah



perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari responden dengan jenis kelamin perempuan.

### 3. Pekerjaan Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri atas bermacam-macam pekerjaan/profesi. Data mengenai pekerjaan responden dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL III  
Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaannya

Pekerjaan	Frekuensi	Persen
Ibu rumah tangga	15	12,4 %
Petani	18	14,9 %
Pedagang/pengusaha/wiraswasta	26	21,5 %
PNS/guru/perangkat desa/bidan	19	15,7 %
Karyawan/swasta/buruh	31	25,6 %
Pelajar/mahasiswa	12	9,9 %
Total	121	100%

Sumber : Kuesioner

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 121 responden, paling banyak berasal dari kalangan swasta, karyawan, dan buruh yaitu sebanyak 31 orang (25,6%). Kedua adalah pedagang, pengusaha, dan wiraswasta sebanyak 26 orang (21,5%). Sedangkan jumlah dari kalangan ibu rumah tangga, petani dan PNS hampir sama, masing-masing 15 orang (12,4%), 18 orang (14,9%), dan 19

orang (15,7%). Sedangkan yang paling sedikit yaitu kalangan pelajar dan mahasiswa sebanyak 12 orang (9,9%).

#### 4. Pendidikan Responden

Responden dalam penelitian ini berasal dari beberapa kalangan menurut tingkat pendidikannya. Pendidikan rendah yaitu tidak tamat SD, tamat SD, hingga SMP/ sederajat. Pendidikan menengah yaitu tamat SMA/SMK/ sederajat. Sedangkan golongan berpendidikan tinggi yaitu minimal Diploma I dan Sarjana. Hal itu dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL  
Responden Berdasarkan Pendidikannya

Pendidikan	Frekuensi	Persen
Tidak tamat SD/SD/SMP	42	34,7 %
SMA/SMK/Sederajat	53	43,8 %
Diploma/Sarjana	26	21,5 %
Total	121	100%

Sumber : Kuesioner

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan menengah ke bawah. Dari 121 responden, sebanyak 53 orang (43%) berpendidikan menengah. Responden yang berpendidikan rendah tergolong masih banyak, yaitu 42 orang (34,7%). Sedangkan yang berpendidikan tinggi hanya 26 orang (21,5%).

#### 5. Penghasilan Keluarga

Penghasilan keluarga responden dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu kalangan ekonomi bawah ( $\leq$  Rp 750.000,00), ekonomi menengah (Rp 800.000,00) – Rp 1.500.000,00), dan ekonomi atas ( $>$  Rp 1.500.000,00). Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL III.5  
Responden Berdasarkan Besarnya Penghasilan Keluarga

Penghasilan	Frekuensi	Persen
0	5	4,1 %
$\leq$ 750.000	48	39,7%
800.000 – 1.500.000	35	28,9 %
$>$ 1.500.000	33	27,3 %
Total	121	100%

Sumber : Kuesioner

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar responden tergolong masyarakat ekonomi rendah dengan penghasilan rata-rata kurang dari atau sama dengan Rp 750.000,00 per bulan, yaitu sebanyak 48 orang (39,7%) dari 121 responden. Sedangkan jumlah kalangan ekonomi menengah dan atas tidak jauh berbeda, masing-masing yaitu 33 orang (27,3%) dan 35 orang (28,9%). Selain itu terdapat 5 orang (4,1%) responden yang tidak mempunyai penghasilan.

#### 6. Keikutsertaan dalam organisasi/partai

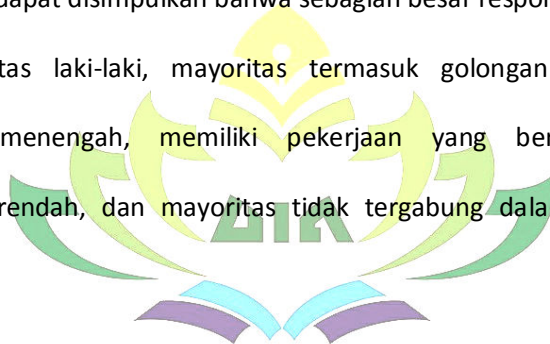
Berkaitan dengan organisasi atau partai yang diikuti, beberapa responden ada yang tergabung didalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL III.  
Responden Berdasarkan Keikutsertaannya dalam Organisasi/Partai

Keikutsertaan	Frekuensi	Persen
mengikuti organisasi/partai	9	7.4 %
tidak mengikuti oranisasi/partai	11	92.6%
Total	121	100%

Sumber : Kuesioner

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden tidak tergabung dalam suatu organisasi atau partai. Dari 121 responden, sejumlah 112 orang (92,6%) tidak bergabung dalam suatu organisasi atau partai. Sedangkan yang ikut bergabung dalam organisasi atau partai hanya 9 orang (7,4%). Dari rangkaian deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah sebagai berikut: mayoritas laki-laki, mayoritas termasuk golongan muda, mayoritas berpendidikan menengah, memiliki pekerjaan yang bervariasi, mayoritas berpenghasilan rendah, dan mayoritas tidak tergabung dalam organisasi/partai manapun.



## **BAB IV**

### **FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA**

#### **C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Turunnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji**

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mesuji merupakan sarana bagi masyarakat Kabupaten Mesuji untuk berpartisipasi di bidang politik. Akan tetapi masyarakat Kabupaten Mesuji tampaknya kurang antusias untuk berpartisipasi dalam bidang politik terutama dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2017. Pancajaya, salah satu kabupaten di Mesuji menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakatnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2017 tergolong masih rendah. Pengukuran tingkat partisipasi Masyarakat Kabupaten Mesuji kecamatan Pancajaya dalam Pilkada Mesuji tahun 2017 didasarkan pada indikator bentuk-bentuk partisipasi Masyarakat berikut kemudian masing-masing jawaban diberi nilai nilai 1-3. Nilai dari masing-masing indikator kemudian dijumlahkan untuk mengetahui tinggi rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Mesuji kecamatan Pancajaya dalam Pilkada Mesuji 2017.

Partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partisipasi secara konvensional yaitu yang normal atau lazim terjadi dalam masyarakat. Adapun bentuk-bentuknya yaitu: memper bincangkan atau mendiskusikan dengan orang lain perihal seputar Pilkada Mesuji 2017, mengikuti kampanye dalam Pilkada Mesuji 2017, menyumbang dana untuk kegiatan

kampanye, mempengaruhi orang lain untuk memilih menjadi tim sukses, menjadi panitia dalam Pilkada Mesuji 2017, serta memberikan suara dalam Pilkada Mesuji 2017. Adapun data mengenai bentuk-bentuk partisipasi Politik masyarakat untuk mengukur tinggi rendahnya partisipasi Politik masyarakat Kabupaten Pancajaya dalam Pilkada Mesuji 2017 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

1. Memperbincangkan atau mendiskusikan dengan orang lain perihal Pilkada

Bentuk partisipasi politik yang pertama adalah memperbincangkan atau mendiskusikan dengan orang lain perihal seputar Pilkada Mesuji 2017.

Adapun data mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  
Memperbincangkan Atau Mendiskusikan

Kategori	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah
a. Memperbincangkan atau mendiskusikan secara terprogram	3	4.2	2	4.1	5
b. Memperbincangkan atau mendiskusikan secara tidak terprogram	24	33.3	18	36.7	42
c. Tidak memperbicangkan atau mendiskusikan	45	62.5	29	59.2	74
Total	72	100	49	100	121

Sumber: Kuesioner

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak memperbincangkan atau mendiskusikan dengan orang lain tentang hal-hal seputar Pilkada Mesuji 2017. Dari 121 responden, ada 74 orang (61,2 %) yang tidak memperbincangkan atau mendiskusikan dengan orang lain perihal

seputar Pilkada Mesuji 2017. Sementara itu 42 responden (34,7%) memperbincangkan atau mendiskusikan perihal seputar Pilkada Mesuji 2017 secara tidak terprogram. Yang dimaksud tidak terprogram dalam hal ini adalah berdiskusi secara informal dan pada waktu yang tidak ditentukan seperti mengobrol seputar Pilkada dengan keluarga atau teman. Sedangkan 5 responden lainnya (4,2%) memperbincangkan atau mendiskusikan perihal seputar Pilkada Mesuji 2017 secara terprogram. Yang dimaksud terprogram dalam hal ini adalah berdiskusi secara formal seperti diskusi kelompok yang membahas seputar Pilkada dan dilaksanakan pada waktu tertentu. Mengenai hal tersebut di atas, diperoleh data bahwa sebagian besar responden yang memperbincangkan atau mendiskusikan perihal seputar Pilkada Mesuji 2017 adalah laki-laki. Survey menunjukkan dari 47 responden yang memperbincangkan atau mendiskusikan perihal seputar Pilkada Mesuji 2017, sebanyak 27 orang (37,5%) adalah responden laki-laki ( $n=72$ ) dan 20 orang (40,8%) adalah perempuan ( $n=49$ ). Sedangkan hasil indepth interview yaitu dari 11 orang yang memperbincangkan atau mendiskusikan perihal seputar Pilkada Mesuji 2017, 6 diantaranya adalah laki-laki dan 5 perempuan. Sehingga nampak bahwa responden laki-laki lebih aktif dalam memperbincangkan atau mendiskusikan perihal Pilkada daripada responden perempuan. Rata-rata mereka memperbincangkannya dengan keluarga maupun rekan kerja.

Seperti dijumpai pada seorang wiraswasta, Mujiono (45 tahun) sebagai berikut:

“Ya, ya sekali dua kali. Biasanya ya dengan rekan-rekan seprofesi ataupun yang pandangannya itu kira-kira hampir sama. Ya masalah sosok calon, dan juga pandangan secara umum ya. Ya secara umum itu masalah pengembangan pribadi calon- calon yang akan di..apa..yang arep dipilih..ngono lah cara-carane.” (wawancara: Senin, 15 September 2017).

Mujiono mengungkapkan diantaranya memperbincangkan tentang Pilkada dengan rekan-rekannya yang memiliki pandangan sama dengannya. Sedangkan Vika Istri Yohana (22 tahun) mengatakan bahwa ia tidak pernah meluangkan waktu khusus untuk mengobrolkan masalah Pilkada, seperti yang diungkapkannya berikut ini:

“Sebenarnya sih nggak sering ya..cuma ya kadang-kadang kalau pas di kos dengan teman-teman, tapi itu sifatnya sliweran, gitu. Jadi nggak sengaja meluangkan waktu untuk ngobrolin soal Pilkada itu.”(wawancara: Kamis, 11 September 2017).

Mengenai hal apa saja yang diperbincangkan, sebagian responden mengaku membicarakan tentang karakter calon Kepala Daerah, program kerja mereka, serta kelayakannya untuk memimpin Mesuji, seperti yang diungkapkan oleh Siti Nur Hidayah, seorang guru. Berikut petikan wawancaranya:

”Pernah, tapi nggak sering. Kalau bicara intensitas berapa kali itu nggak mesti. Kalo ngobrol seperti itu ya paling pas di sekolah, di kantor, dengan teman kerja, rekan kerja, palingan itu. Apa ya, ngomongin apa, paling calonnya siapa, terus kira-kira itu program kerjanya itu seperti apa, terus nanti kira-kira mau milih siapa, seperti itu. (wawancara: Minggu, 14 September 2017).

Ada pula yang membicarakan tentang hal-hal teknis seputar



pelaksanaan Pilkada Mesuji 2017. Seperti yang diungkapkan Himawan Subagyo (45 tahun), seorang pegawai kecamatan, sebagai berikut:

“O, ya, ya, jelas saya memperbincangkan. Karena kebetulan saya terlibat dalam kepanitiaan. Ya bisa dikatakan tiap hari ya, minimal hampir tiap hari, ya paling ndak seminggu dua sampai tiga hari memperbincangkan itulah. Pertama dengan panitia di tingkat desa, kan kadang ada hal-hal penting seputar pelaksanaan atau apa, tapi biasanya kalau diskusi ngobrolin gitu ya sekedar dengan teman lah, dengan teman. Ya..teman kerja.” (wawancara: Rabu, 3 September 2017)

Himawan mengungkapkan bahwa dia hampir tiap hari memperbincangkan tentang Pilkada, tetapi yang diperbincangkan lebih banyak mengenai teknis pelaksanaan karena dia termasuk panitia Pilkada tingkat kecamatan. Sama halnya dengan Himawan, Turno juga lebih banyak memperbincangkan seputar teknis pelaksanaan Pilkada selain juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pilkada. Turno mengungkapkan hal sebagai berikut:

“Ya. Kadang dua tiga kali. Karena saya terjun langsung dalam hal ini sebagai ketua PPS jadi ya kadang dengan anggota PPS, dengan masyarakat, dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pilkada ini. Kalau saya, dalam kapasitasnya sebagai panitia, ini yang diperbincangkan adalah dalam hal tentang suksesnya pelaksanaan pemungutan suara dan pentingnya memilih calon pemimpin yang akan memimpin.” (wawancara: Selasa, 16 September 2017)

Demikian nampak bahwa partisipasi politik dalam Pilkada yang berbentuk memperbincangkan atau mendiskusikan perihal seputar Pilkada Mesuji 2017 menurut hasil survey masih kurang bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Mesuji. Bagi responden yang memperbincangkan atau mendiskusikan perihal seputar Pilkada Mesuji 2017 sebagian besar

adalah kaum laki-laki. Dalam hal ini laki-laki cenderung nampak lebih aktif daripada perempuan. Bagi sebagian yang mendiskusikannya, diantaranya memperbincangkan dengan keluarga maupun rekan kerja. Sedangkan intensitasnya tidak rutin, tetapi pada saat-saat menjelang pemilihan biasanya lebih sering memperbincangkannya.

## 2. Mengikuti kampanye PilkadaMesuji 2017 seputar Pilkada Mesuji 2017

Bentuk partisipasi politik konvensional selanjutnya adalah mengikuti kampanye. Data mengenai jumlah responden yang mengikuti kampanye dari pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Mesuji 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel III

Kategori	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah
a. Ikut kampanye sebagai juru kampanye	-	0	0	0	0
b. Ikut kampanye sebagai simpatisan	-	0	1	2.1	1
c. Tidak ikut kampanye	72	100	48	97.9	120
Total	72	100	49	100	121

Sumber: Kuesioner

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir semua responden (99,2%) tidak mengikuti kampanye calon Kepala Daerah dalam Pilkada Mesuji 2017. Hanya terdapat 1 orang (0,8%) mengikuti kampanye sebagai simpatisan salah satu pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Mesuji 2017 yaitu perempuan. Jadi, dalam hal ini nampak bahwa perempuan terlihat cenderung

lebih aktif dalam mengikuti kampanye daripada laki-laki. Dari survey nampak bahwa tidak ada responden yang berperan sebagai juru kampanye dalam Pilkada Mesuji 2017.

Dari wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap responden, diperoleh data bahwa sebagian masyarakat kurang berminat mengikuti kampanye karena merasa kurang penting. Seperti diungkapkan seorang petani, Miso (49 tahun), baginya mengikuti kampanye hanya buang-buang waktu saja. Bahkan ia menggunakan istilah bahwa ikut-ikutan kampanye seperti itu sama saja dengan bunuh diri, karena menurutnya hal itu tidak penting dan hanya membuang sebagian waktunya yang harusnya bisa ia gunakan untuk bekerja dan menghasilkan uang. Berikut diungkapkan Miso:

“Lah ya ora...sing jenenge wong koyo nyong kiye, wegah lah melo-melo koyo ngono kuwe. Ibarate nek siwo melo koyo ngono ya podo wae bunuh diri..ya kan? Lha bayangke wae, sendino-ndino gaweane koyo ngene, lha nek tak tinggal nggo koyo ngana ya mengko ra kasil, eman-eman malah bunuh diri nek ming buang-buang wektu nggo kegiatan ra kanggo gawe. Anak bojo arep dipakani apa..mending nang sawah, macul. Ye ko ngene ye, mbeduli suket ngurus bibit, kan malah migunani..”(wawancara: Minggu, 5 Oktober 2017).

Lain halnya dengan Siti Nur Hidayah (25 tahun), ia tidak mengikuti kampanye karena dia adalah seorang guru di mana seorang guru memang diharuskan bersikap netral. Hal senada juga diungkapkan Turno, Himawan, dan Samsu Giharto yang berprofesi sebagai PNS. Ketika ditanya perihal keikutsertaannya dalam kegiatan kampanye, Himawan mengungkapkan sebagai berikut:

“Tidak tidak. Karena, pertama saya sebagai seorang PNS harus netral,

kedua karena saya di dalam kepanitiaan, jadi ya jelas ndak boleh.”(wawancara: Rabu, 3 September 2017).

Sedangkan salah seorang anggota Dewan di Kabupaten Mesuji mengaku ikut serta dalam kegiatan kampanye, Sri Susilowati (45 tahun) mengungkapkan hal sebagai berikut:

“Kampanye. Iya. Saya kebetulan jurkam, juru kampanye..wujud kampanyenya, saya kemarin hanya menggunakan kampanye secara dialogis.jadi saya ketemu di ruangan. Karena saat ini kampanye di tempattempat umum, terbuka, itu sudah tidak efektif. Seperti kalau misal nanggap dangdut itu kan cuma hura-hura, sekedar ingin menikmati dangdut saja terus pergi itu kan kampanyenya jadi tidak efektif. Jadi kami memang tidak menggunakan cara itu alasannya yang pertama ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakat gitu lho, sebenarnya apa toh.apa arti pemilihan, pemilihan Kepala Daerah itu, kita juga bisa menyampaikan visi misi, visi misi itu akan bisa masuk. Tapi kalo kita menggunakan kampanye secara umum, seperti dangdut tadi kita nggak akan bicara visi misi karena itu sifatnya umum, dan kita menggunakan kampanye secara dialogis jadi bisa menyampaikan tepat sasaran.karena kebetulan saya jurkam salah satu calon ya saya akan menyampaikan kebaikan dari calon saya itu, mungkin dia nantinya peserta kampanye akan mempertimbangkan juga untuk memilih calon saya itu.diharapkan seperti itu.” (wawancara: Sabtu, 13 September 2017).

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa sebagian masyarakat tampaknya menganggap bahwa mengikuti kampanye itu tidak penting dan sebagian yang lainnya tidak mengikuti kampanye karena dibatasi oleh peraturan bahwa pegawai negeri sipil harus netral. Sementara itu pihak juru kampanye sendiri mengakui bahwa memang antusiasme masyarakat dalam mengikuti kampanye sangat rendah. Hal itu dikarenakan cara berkampanye yang kurang efektif sehingga bagi sebagian masyarakat dianggap kurang bermanfaat. Oleh karena itu, juru kampanye berusaha melakukan kampanye

secara dialogis supaya lebih efektif dan dapat diterima masyarakat.

Berkaitan dengan peraturan bahwa PNS harus bersifat netral, menurut Afan Gaffar peraturan seperti itu memang perlu diadakan karena PNS harus dikembalikan kepada fungsi dan kedudukannya yang sebenarnya, yaitu sebagai institusi yang memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Untuk itu, diperlukan sebuah institusi pegawai negeri yang netral yang tidak merupakan alat politik dari kekuatan politik apapun.

3. Menyumbang dana untuk kegiatan kampanye bagi pasangan calon Kepala Daerah

Sama seperti responden yang mengikuti kegiatan kampanye pasangan calon Kepala Daerah, responden yang menyumbang dana untuk kegiatan kampanye pun hampir tidak ada. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  
Menyumbang Dana Untuk Kampanye calon Kepala Daerah

Kategori	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah
a. Menyumbang dana secara pribadi	-	0	0	0	0
b. Menyumbang dana secara kolektif	1	1.4	0	0	1
c. Tidak menyumbang dana	71	98.6	49	100	120
Total	72	100	49	100	121

Sumber: Kuesioner

Tabel di atas menunjukkan angka yang sama dengan tabel sebelumnya, yaitu menunjukkan bahwa dari 121 responden, terdapat 120

responden (99,2%) yang tidak menyumbang dana untuk kampanye pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Mesuji 2017. Hanya 1 orang responden (0,8%) yang menyumbang dana secara kolektif untuk kegiatan kampanye pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Mesuji 2017. Dalam hal ini, responden yang menyumbang dana untuk kampanye pasangan calon Kepala Daerah adalah laki-laki sehingga di sini nampak bahwa laki-laki cenderung lebih aktif daripada perempuan.

4. Mempengaruhi orang lain untuk memilih salah satu pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Mesuji 2017

Bentuk partisipasi politik dalam Pilkada Mesuji yang keempat yaitu mempengaruhi orang lain untuk memilih salah satu pasangan calon Kepala Daerah. Adapun datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL**

Kategori	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah
a. Mempengaruhi kelompok	3	4.2	1	2.1	4
b. Mempengaruhi individu (teman, tetangga, keluarga)	6	8.3	3	6.1	9
c. Tidak mempengaruhi orang lain	63	87.5	45	91.8	108
Total	72	100	49	100	121

Sumber: Kuesioner

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu 108 orang (89,3 %) tidak mempengaruhi orang lain untuk memilih salah satu pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Mesuji 2017. Sedangkan 9

orang (7,4%) mempengaruhi orang lain untuk memilih salah satu pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Mesuji 2017 seperti teman, tetangga, maupun keluarga. Sementara itu terdapat 4 orang responden yang mempengaruhi kelompok tertentu untuk memilih salah satu pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Mesuji 2017.

Sedangkan survey menunjukkan, dari 13 orang yang mempengaruhi orang lain untuk memilih salah satu pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Mesuji 2017, 9 orang diantaranya (12,5%) adalah laki-laki ( $n=72$ ) dan 4 orang lainnya (8,2%) adalah perempuan ( $n=49$ ). Jadi dalam hal ini laki-laki cenderung lebih aktif daripada perempuan. Akan tetapi, secara keseluruhan sebagian besar masyarakat tidak mempengaruhi orang lain untuk memilih salah satu pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Mesuji 2017.

Berkenaan dengan hal di atas, Himawan Subagyo (45 tahun), seorang pegawai kecamatan mengatakan:

“Saya tidak mempengaruhi siapapun untuk memilih calon yang mana, saya hanya menyarankan mereka untuk menggunakan hak pilih mereka dalam Pilkada tersebut. Jadi, saya hanya menggiring mereka untuk menggunakan hak pilih, tetapi tidak mengarah pada salah satu pasangan. maksudnya saya hanya memberi motivasi agar mereka menggunakan hak pilihnya. Gitu aja.” (wawancara: Rabu, 3 September 2017).

Himawan mengungkapkan bahwa kapasitasnya sebagai panitia sehingga ia tidak mempengaruhi orang lain untuk memilih calon tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi dalam memotivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Hal itu senada dengan yang dikatakan Turno,

guru 45 tahun sebagai berikut:

“Mempengaruhi, tidak, karena saya sebagai panitia. Jadi saya bersifat netral tidak menyuruh untuk harus memilih yang mana. Hanya saja menaruh mereka memilih gitu aja. Kalau keluarga sama sekali tidak karena kami demokratis jadi bebas menentukan pilihan sendiri. Bahkan saya, istri saya, dan anak saya beda semua pilihannya. Karena kami memang membebaskan sesuai pilihan masing-masing.” (wawancara: Selasa, 16 September 2017)

Di lain pihak, Vika Istri Yohana (22 tahun) juga mengaku tidak pernah mempengaruhi orang lain untuk memilih salah satu pasangan calon Kepala Daerah. Berikut petikan wawancaranya:

“Tidak, aku sih bebas ya, toh apa juga untungnya aku ngaruh-ngaruhin orang lain wong aku aja nggak ada kaitane sama sekali dengan para calon Kepala Daerah itu. Jadi ya milih milih terserah maunya yang mana. Malah kadang aku sama temenku saling mengejek..eh bukan mengejek ya, dalam artian kita tuh bercanda dukung pilihan kita masing-masing, gitu..tapi nggak saling mempengaruhi atau yang sampai ngejelek-jelekin gitu enggak..cuma guyonan aja gitu..” (wawancara: Kamis, 11 September 2017).

Berdasarkan keterangan di atas dapat nampak bahwa sebagian besar responden memang tidak mempengaruhi orang lain untuk memilih salah satu pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Mesuji 2017. Sebagian besar menganggap bahwa memilih merupakan hak masing-masing perorangan sehingga setiap orang bebas memilih sesuai keinginan mereka tanpa dipengaruhi orang lain.

5. Bergabung dalam tim sukses salah satu pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Mesuji 2017

Bentuk partisipasi politik dalam Pilkada Mesuji yang lain yaitu bergabung atau menjadi tim sukses salah satu pasangan calon Kepala Daerah.



Data mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL

Kategori	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah
a. Menjadi tim sukses inti	1	1.4	1	2.1	2
b. Menjadi tim sukses relawan	-		-	0	0
c. Tidak ikut menjadi tim sukses	69	95.8	48	97.9	119
Total	72	100	49	100	121

Sumber: Kuesioner

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir seluruh responden yaitu sebanyak 117 orang (96,7%) dari 121 responden memiliki tidak bergabung dalam tim sukses salah satu pasangan calon Kepala Daerah, tetapi terdapat 2 orang (1,65%) laki-laki dan perempuan yang turut menjadi tim sukses inti bagi pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Mesuji 2017 dan 2 perempuan menjadi tim sukses relawan bagi pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Mesuji 2017.

Sehingga hal tersebut nampak bahwa perempuan lebih aktif daripada laki-laki dalam hal menjadi tim sukses salah satu pasangan calon dalam Pilkada Mesuji 2017. Hasil indepth-interview menunjukkan bahwa dalam hal ini perempuan lebih aktif menjadi tim sukses salah satu pasangan calon dalam Pilkada Mesuji 2017.

Berdasarkan keterangan di atas, secara keseluruhan nampak bahwa sebagian besar masyarakat tidak berpartisipasi politik dalam bentuk menjadi

tim sukses salah satu pasangan calon Kepala Daerah. Akan tetapi dilihat dari keaktifan laki-laki dan perempuan, maka dalam hal ini perempuan cenderung lebih aktif. Sebagai tim sukses, seperti Sri Susilowati berusaha untuk mempengaruhi orang lain untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang ia wakili. Akan tetapi, untuk Sutriyani yang pernah menjadi tim sukses relawan sementara, hanya sempat membagikan stiker dan tanggalan karena sebagai istri PNS ia mengaku tidak diijinkan untuk menjadi tim sukses dan diharuskan bersifat netral

#### 6. Menjadi panitia dalam Pilkada Mesuji 2017

Salah satu bentuk partisipasi politik yang lain yaitu menjadi panitia dalam Pilkada Mesuji 2017. Responden yang ikut menjadi panitia dalam Pilkada Mesuji 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL**

Kategori	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah
a. Menjadi panitia penyelenggara	1	1.4	-	0	1
b. Menjadi panitia pelaksana	10	13.9	-	0	10
c. Tidak menjadi panitia	61	84.7	49	100	110
Total	72	100	49	100	121

Sumber: Kuesioner

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (90,9%) tidak ikut menjadi panitia dalam Pilkada Mesuji 2017. Responden yang menjadi panitia pelaksana Pilkada Mesuji 2017 baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa berjumlah 10 orang (8,3%) dari total responden

sebanyak 121 orang dan kesemuanya adalah laki-laki. Sementara itu terdapat 1 orang responden sebagai panitia penyelenggara Pilkada Mesuji 2017 yaitu anggota KPUD Kabupaten Mesuji. Melihat bahwa keseluruhan responden yang menjadi panitia Pilkada adalah laki-laki, dengan demikian nampak bahwa responden laki-laki lebih aktif dalam hal menjadi panitia dalam Pilkada daripada responden perempuan. Responden indepth interview yang menjadi panitia dalam Pilkada Mesuji 2017 ada 4 orang, yaitu Himawan Subagyo (Staf Sekretariat PPK), Maskur (Ketua KPPS), Turno (Ketua PPS), dan Mujiono (anggota PPS). Diantara responden yang menjadi panitia seperti Himawan Subagyo (45 tahun), seorang PNS, memberikan keterangan sebagai berikut:

“Ya, panitia ikut jadi sekretariat PPK, yaitu tingkat kecamatan. Saya sebagai anggota sekretariat di wilayah kecamatan. Yang dilakukan antara lain ikut membantu menyusun, mendaftar pemilih, surat suara, dan sebagainya itu kan dari desa, kemudian dikirim ke kecamatan. Kemudian membantu menangani pengiriman logistic dari KPU ke daerah. Bidang saya sebenarnya logistik, jadi ada kotak suara, surat suara, buku-buku, ada macam-macam yang kaitannya dengan perlengkapan, itu saya, saya bagian logistik. Termasuk juga membantu bidang administrasi lah, administrasi, ada rapat, mengundang rapat dari desa kan yang mempersiapkan kita.” (wawancara: Rabu, 3 September 2017). Himawan merupakan panitia Pilkada di tingkat kecamatan, sementara itu di lain pihak Turno (45 Tahun) merupakan panitia Pilkada di tingkat desa mengungkapkan sebagai berikut: “Panitia saya sebagai ketua KPPS eh ketua PPS. Sebagai panitia itu berusaha untuk mensukseskan terlaksananya pemilihan Kepala Daerah, dan juga memberikan pengarahan kepada masyarakat maupun panitia di bawahnya demi kelancaran pelaksanaan pemilihan nantinya.”(wawancara: Selasa, 16 September 2017)

Berdasarkan keterangan di atas, sebagian besar responden tidak menjadi panitia dalam Pilkada Mesuji 2017, hal itu disebabkan karena kesempatan menjadi panitia dalam Pilkada sendiri memang terbatas.

7. Memberikan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Mesuji 2017

Bentuk partisipasi politik yang paling lazim adalah memberikan suara. Adapun data mengenai responden yang memberikan suara untuk salah satu pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Mesuji 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL

Kategori	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah
a. Memberikan suara dengan penilaian/pertimbangan tertentu terhadap pasangan yang dipilih	37	51.4	25	51.1	62
b. Memberikan suara tanpa penilaian/pertimbangan tertentu terhadap pasangan yang dipilih	18	25	9	18.4	27
c. Tidak memberikan suara/golput	17	23.6	15	30.5	32
Total	72	100	49	100	121

Sumber: Kuesioner

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpartisipasi dalam Pilkada Mesuji 2017 dengan memberikan suara untuk salah satu pasangan calon Kepala Daerah. Dari 121 responden, diantaranya terdapat 62 responden (51,2%) yang memberikan suara terhadap pasangan calon Kepala Daerah dengan didasarkan pada penilaian/pertimbangan terhadap pasangan yang dipilih. Sementara itu 27 orang (22,3%) memberikan suara terhadap pasangan calon

Kepala Daerah tidak didasarkan pada penilaian/pertimbangan tertentu terhadap pasangan yang dipilih. Sedangkan sebanyak 32 orang lainnya (26,4%) tidak memberikan suara alias golput.

Hasil survey menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih banyak memberikan suara daripada responden perempuan. Dilihat dari keaktifannya, dari 72 orang jumlah responden laki-laki, sebanyak 55 orang (76,4%) memberikan suara dan 17 orang (23,6%) golput. Sedangkan dari jumlah responden perempuan sebanyak 49 orang, terdapat 34 orang (69,4%) memberikan suara dan 15 orang lainnya (30,6%) golput. Dengan demikian nampak bahwa laki-laki cenderung lebih aktif dalam memberikan suara daripada perempuan.

Dari kesepuluh responden yang memberikan suara, 6 orang diantaranya adalah laki-laki dan 4 orang lainnya perempuan. Sementara itu dari kelima responden yang golput, 3 orang diantaranya adalah perempuan dan 2 orang lainnya laki-laki. Dari beberapa indikator tingkat partisipasi politik berupa bentuk partisipasi politik dalam Pilkada Mesuji 2017 seperti tersebut di atas, jumlah nilai dari masing-masing indikator dijumlahkan untuk mengetahui tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik secara keseluruhan di kalangan masyarakat kecamatan Pancajaya. Dari masing-masing indikator, nilai kategori  $a=3$ ,  $b=2$ , dan  $c=1$ . Jumlah nilai tertinggi yang diperoleh responden dari semua indikator adalah 17, sedangkan jumlah nilai terendah yang diperoleh responden adalah 7.

Kategori yang ditentukan adalah 3 yaitu tinggi, sedang, rendah (jumlah

interval kelas). Sehingga untuk menentukan lebar interval kelas menggunakan rumus:

$$C = R/k$$

Dimana

c= Lebar interval kelas

R = Kisaran data (selisih data terbesar dengan terkecil)

k = Jumlah interval

Di sini diketahui kisaran data/R= 17-7= 10

k= 3

jadi c= 10/3= 3,33

untuk mempermudah maka interval kelas dibulatkan menjadi 4, dengan hasil sebagai berikut, data mengenai tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Mesuji 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Nilai	Frekwensi	Persentase %
1. 15-17	4	3.3
2. 11-14	43	35.5
3. 7-10	74	61.2
Total	121	100

Sumber: Kuesioner

Maka kategori tingkat partisipasi berdasarkan nilai 15-17 tergolong tinggi, jumlah nilai 11-14 tergolong sedang, dan jumlah nilai 7-10 tergolong rendah. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa partisipasi politik masyarakat Kabupaten

Pancajaya dalam Pilkada Mesuji tahun 2017 tergolong rendah. Dilihat dari 121 responden, 74 orang (61,2%) diantaranya kurang berpartisipasi aktif dalam Pilkada Mesuji 2017. Responden yang tergolong tingkat partisipasinya sedang sebanyak 43 orang (35,5%) sementara responden yang berpartisipasi aktif atau tingkat partisipasi politik tinggi sebanyak 4 orang (3,3%). Angka-angka tersebut cenderung menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Pancajaya untuk berpartisipasi politik dalam Pilkada Mesuji 2017. Dari keempat responden yang memiliki tingkat partisipasi tinggi, 3 diantaranya adalah responden laki-laki dan 1 orang perempuan. Sehingga nampak bahwa laki-laki lebih aktif berpartisipasi daripada perempuan.

#### **D. Solusi Untuk Mengatasi Masalah Penurunan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji**

Rendah nya partisipasi politik masyarakat juga tak lepas dari rendah nya kesadaran politik,sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah.kesadaran politik yakni pengetahuan masyarakat akan sosial politik serta perhatian nya terhadap lingkungan sosial dan politik.sikap kepercayaan seseorang terhadap system poltik yakni bagaimana seseorang memberikan penilaian terhadap suatu pemerintahan,dipercayai atau tidak dan di sukai atau tidak.

Hal ini sesuai dengan komponen dari budaya politik dimanaada orientasi kognitif yaitu pengetahuan ,orientasi afektif yakni perasaan atau kepercayaan dan

orientasi evaluative. sehingga jika di rangkai maka seseorang dalam memilih maupun bertindak dalam politik harus mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang politik serta orang yang mencalonkan diri dalam pemilihan, setelah mengetahui maka akan menimbulkan suatu kepercayaan, setelah memiliki kepercayaan seseorang baru dapat memutuskan siapa yang akan dia pilih. Kesadaran politik masih sangat rendah dalam masyarakat Indonesia, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak ingin tahu sehingga berdampak pada aspek lainnya pada politik, ekonomi dan yang lainnya. Sehingga jika pengetahuan saja tidak punya maka bagaimana kepercayaan akan muncul,

Salah satu faktor penting penyebab rendahnya partisipasi politik yakni ketidaknetralan media dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Media yang harusnya netral tidak lagi bersikap pemberi informasi yang valid karena media juga dikuasai oleh elit-elit politik sehingga informasi yang diberitakan hanya berpihak pada partai politik tertentu. Tak jarang kita melihat media yang saling bersaing untuk menjatuhkan lawan politiknya. Hal ini yang masyarakat menjadi bingung karena informasi yang diberitakan tidak lagi murni namun sudah dicampuri oleh kepentingan kepentingan politik sehingga masyarakat lebih memutuskan untuk bersikap pasif dibanding salah mengambil langkah karena hanya terpaku pada satu media yang tidak lagi netral.

Secara sederhana, kita dapat melandaskan cara cara tersebut pada ketentuan pasal 246 UU Nomor 08/2012. Tentang pemilu. Terdapat beberapa hal yang dapat



dijadikan instrument untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dalam ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan menjadi empat bentuk, yaitu sosialisasi, pendidikan bagi pemilih, survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.

Adanya beberapa konsep dan sarana bagi partisipasi masyarakat tentu saja perlu untuk dimaksimalkan

1. Hal yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya pemilu dalam sebuah Negara yang demokratis, bukan hanya sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu. Meskipun dalam ketentuan undang-undang menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu, namun sosialisasi segala hal yang melatar belakangi pemilu untuk dilakukan. Hal ini menjadi penting karena penanaman pemahaman terkait dengan asensi dan kaidah-kaidah demokrasi merupakan inti penggerak semangat masyarakat untuk terus menjaga demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Negara ini.
2. Pendidikan bagi pemilu perlu mendapatkan fokus yang jelas. Ini terkait dengan proses segmentasi pendidikan pemilih. Pemilih pemula merupakan segmentasi penting dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih dan tentunya pendidikan bagi memilih pemulaini tidak hanyadi lakukan ketika masuk usia pilih. Namun lebih dari itu, pendidikan bagi pemula seyogyanya di lakukan sedini mungkin, sehingga pemahaman tersebut terbangun dan

ketika sudah mencapai usia pemilih, para pemilih pemula sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas.

3. Survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat yang kini banyak mendapatkan sorotan publik terkait dengan integritas pelaksanaannya. Banyak anggapan bahwa survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dilakukan hanya untuk kepentingan profit saja. Namun, di satu sisi perlu diperhatikan bahwa keberadaan kegiatan survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat sangatlah penting. Kegiatan tersebut juga bisa dijadikan sebuah sarana menyebar luaskan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Untuk itu kegiatan survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat perlu mendapatkan dukungan, karena kegiatan tersebut merupakan sarana yang tentu saja bukan hanya ditunjukkan untuk menghitung atau profit saja, namun lebih dari itu, ada proses pendidikan bagi para pemilih serta informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu.
4. Peningkatan kinerja penyelenggara pemilu, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggara, namun juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga masyarakat bisa memahami partisipasi apa saja yang dapat dilakukan dan output dari partisipasi tersebut.

Belajar dari kelemahan dan kritik dari demokrasi electorial maka ukuran tentang kualitas pilkada langsung seharusnya tidak diletakkan semata-mata

pada ukuran formal procedural, melainkan jauh lebih dalam pada ukuran-ukuran kualitatif dan substantif berikut inimerupakan indicator keberhasilan pilkada langsung :

	<b>Ukuran Keberhasilan Formal-Prosedural</b>	<b>Ukuran Keberhasilan Demokrasi yang substantif-berkualitas</b>
<b>Partisipasi</b>	Kuantitas pemilih	Pemilih yang kritis Tidak ada diskriminasi bagi pemilih; Tidak ada partisipasi semu; karena mobilisasi dan <i>buying voters</i> .
<b>Kompetisi</b>	Jumlah kompetitor dan syarat formal kandidat terpenuhi	Kualitas kompetisi (Jurdil); peluang yang sama bagi semua warga
<b>Civil Liberties</b>	Secara formal diakui	Tidak ada pembajakan hak-hak politik warga oleh elite
<b>Hasil akhir Pilkada</b>	Terpilihnya kepala daerah-wakil kepala daerah	Peningkatan kualitas <i>responsiveness</i> dan pertanggung jawaban kepala daerah pada warga; mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat serta akhirnya peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, indikator pertama keberhasilan Pilkada adalah Pilkada seharusnya memberi ruang kebebasan bagi warga negara dalam mengekspresikan hak-hak dasar. Kedua, pilkada berlangsung melalui kompetisi yang fair. Ketiga, pilkada seharusnya menciptakan kepemimpinan politik yang berkualitas dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas, ketiga indikator tersebut di atas, seharusnya teraktualisasi dalam setiap tahap penyelenggaraan pilkada, mulai dari tahap pendaftaran pemilih, sampai pada pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Akhirnya, untuk mencapai demokrasi yang lebih substantif berdasarkan indikator di atas, maka cara melihat keberhasilan Pilkada langsung harus diletakkan pada sejauhmana pencapaian dari sisi proses dan hasil. Dalam dimensi proses, Pilkada langsung seharusnya dibaca sebagai sarana untuk memperdalam dan memperluas proses konsolidasi demokrasi di Indonesia secara kualitatif. Sedangkan dalam dimensi hasil; pilkada langsung seharusnya ditempatkan sebagai instrumen untuk mendapatkan kepemimpinan politik yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi warga-masyarakat di daerah.

Untuk memecahkan masalah penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu, berdasarkan data simpulan di atas, maka diperlukan berbagai upaya keras dari penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya. Upaya itu adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat secara lebih intensif dalam masalah pemilu. Pendidikan politik ini maksudkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa dengan adanya pemilu, akan terjadi perbaikan-perbaikan yang signifikan pada kondisi masyarakat secara global;
2. Memberikan penjelasan (informasi yang cukup) kepada masyarakat mengenai rekam jejak masingmasing calon; dan,
3. Menyelenggarakan pemilu secara baik, jujur, adil dan transparan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **C. Kesimpulan**

1. Masyarakat Kabupaten Mesuji untuk berpartisipasi di bidang politik. Akan tetapi masyarakat Kabupaten Mesuji tampaknya kurang antusias untuk berpartisipasi dalam bidang politik terutama dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2017. Faktor yang menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat dalam pilkada kecamatan Pancajaya Kabupaten Mesuji dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat bahwa pemilu dapat merubah/memperbaiki keadaan, kebingungan memilih calon, tidak ada calon favorit, rendahnya kesadaran politik sebagai protes atas pemilu yang tidak adil, team sukses mempengaruhi untuk memilih salah satu pasangan.
2. Untuk memecahkan masalah penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu, berdasarkan data simpulan di atas, maka diperlukan berbagai upaya keras dari penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya. Untuk memecahkan masalah penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu, berdasarkan data simpulan di atas, maka diperlukan berbagai upaya keras dari penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya. Upaya itu adalah sebagai berikut: a) Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat secara lebih intensif dalam masalah pemilu. Pendidikan politik ini maksudkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa dengan adanya pemilu, akan terjadi perbaikan-perbaikan

yang signifikan pada kondisi masyarakat secara global; b) Memberikan penjelasan (informasi yang cukup) kepada masyarakat mengenai rekam jejak masing-masing calon; dan, c) Menyelenggarakan pemilu secara baik, jujur, adil dan transparan.

#### **D. Saran**

Berdasarkan kondisi riil di masyarakat, yang menyebabkan turunnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

##### **1. Untuk Pemerintah**

Masyarakat sepertinya sudah mulai bosan dengan keberadaan pemilu yang terus menerus. Terobosan pemilu serentak yang dilakukan oleh pemerintah melalui undang-undang pemilu sudah cukup tepat untuk diterapkan. Akan tetapi untuk masalah penyelenggaraan pemilu, diharapkan dapat benar-benar berjalan secara bebas, jujur, dan adil. Tidak hanya sekedar slogan, tapi betul-betul dilaksanakan dan dikontrol secara baik.

##### **2. Untuk Para Calon dan Partai Politik**

Menjadi anggota legislative, bukanlah sebatas mencari pekerjaan atau ingin mencari keuntungan. Akan tetapi lebih dari pada itu, semangat pengabdian dan membangun adalah yang terpenting. Oleh karena itu, hendaknya para calon dapat berintrospeksi diri terlebih dahulu sebelum mencalonkan diri. Selain itu, partai juga harus selektif dalam memilih dan

menetapkan calon-calonnya untuk maju.

### 3. Untuk Masyarakat

Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang tidak begitu saja percaya atas informasi-informasi yang tersebar di mana-mana. Tabayyun (cross-check) informasi menjadi penting untuk dilakukan, sehingga tidak mudah terpedaya oleh pihak-pihak tertentu, terutama terkait dengan pemilu. Pemilu memang tidak akan mampu merubah keadaan, akan tetapi keputusan untuk memilih wakil adalah bagian dari kesempatan untuk merubah dan memperbaiki keadaan, sebab mereka yang dipilih adalah orang-orang yang akan menentukan kebijakan secara umum di masyarakat. Kesalahan dalam memilih calon akan berakibat fatal dalam jangka waktu yang panjang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2004
- Ambo Upe, *Sosiologi Politik Kontemporer* Jakarta: Prestasi Pustakarya 2008
- AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Fifth Edition, Editor: Jonathan Crowther ,Toronto, Tokyo, Taipei, Singapore: Oxford University Press, 1995.
- Huntington. P, Samuel. Nelson, Joan, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang* Jakarta: Rineka Cipta 1990
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Cet Ke-7, Bandung: MandarMaju, 1986.
- Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 1993
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992
- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- KPUD Kabupaten Mesuji, *Laporan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2017*, Kabupaten Musuji: KPUD Kabupaten Musuji, 2016.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III Cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini terdiri atas 573 pasal.



Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010

[http://www.kompasiana.com/awaludin.jamilah/peran-mahasiswa-dalam-pemilihan-umum-2014\\_54f73f6ba33311b8128b464c](http://www.kompasiana.com/awaludin.jamilah/peran-mahasiswa-dalam-pemilihan-umum-2014_54f73f6ba33311b8128b464c)Pemilu



# LAMPIRAN



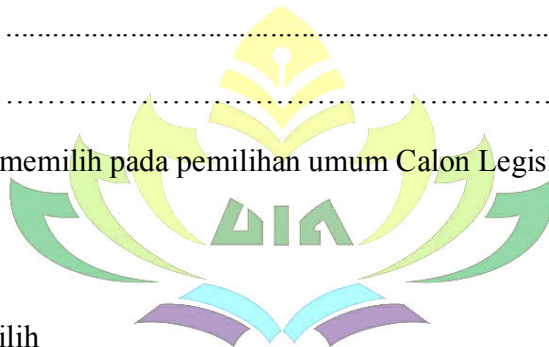
## **DATA KUESIONER**

### **Petunjuk Pengisian:**

1. Kuesioner ini semata-mata untuk mencari kebenaran, mohon dijawab dengan jujur.
2. Bacalah dan jawablah semua pertanyaan dengan teliti tanpa ada yang terlewatkan.
3. Berilah tanda (X) pada jawaban yang menurut anda tepat.

### **Data Responden:**

1. Usia : .....tahun
2. Jenis Kelamin : a. laki-laki b. perempuan
3. Etnis/Suku : .....
4. Agama : a. Islam b. Kristen Katolik c. Kristen Protestan d. Hindu  
e. Budha
5. Pendidikan : .....
6. Pekerjaan : .....
7. 1. Apakah anda ikut memilih pada pemilihan umum Calon Legislatif tahun 2017 yang lalu?
  - a. Ikut memilih
  - b. Tidak ikut memilih
7. 2. (Jika Anda tidak Memilih), mengapa Anda tidak menggunakan hak pilih Anda dalam Pemilu Calon Legislatif 2017 yang lalu?
  - a. Tidak Punya Kartu Pemilih
  - b. Tidak tahu kalau nama saya terdaftar sebagai pemilih
  - c. Sebagai protes karena pelaksanaan Pemilu Calon 2017 disinyalir tidak adil
  - d. Bingung memilih calon Legislatif dan Partai Politik
  - e. Tidak ada calon favorit



- f. Tidak Percaya Pemilu bisa memperbaiki keadaan
- g. Harus Bekerja/Ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan
- h. Ada Intimidasi
- i. Tidak ada Imbalan.
- j. Tidak Tahu.

7. 3. (Jika Anda Memilih), Apa yang menyebabkan Anda memilih Calon Legislatif 2017 yang lalu?

- a. Ada Kartu Pemilih dan Undangan untuk memilih.
- b. Namanya Saya terdaftar sebagai pemilih.
- c. Demi keadilan, kejujuran dan kebebasan bersuara/berpolitik.
- d. Ada pilihan calon Legislatif, meskipun tidak suka partainya.
- e. Ada pilihan partai, meskipun calonnya tidak disukai.
- f. Percaya bahwa Pemilu dapat memperbaiki keadaan.
- g. Pas ditetapkan ada di rumah.
- h. Ada partai dan calon legislative yang cocok.
- i. Ada Intimidasi, bahwa Saya harus memilih.
- j. Ada imbalan yang lumayan.
- k. Tidak tahu, yang penting memilih.

8. 1. (Jika Anda ikut memilih), Apa yang Anda lakukan dalam pemilu calon legislative tahun 2017 yang lalu, sebagai wujud partisipasi Anda dalam pemilu?

- a. Tidak ada/Hanya memilih saja.
- b. Ikut mensosialisasikan dan melaksanakan program KPU.
- c. Ikut mendengarkan sosialisasi para calon dan pendukungnya.
- d. Ikut maju sebagai calon legislative.

- e. Ikut sebagai tim sukses (kampanye/sosialisasi).
  - f. Ikut menyumbang dana kampanye calon legislative.
8. 2. (Jika Anda TIDAK ikut memilih), Apa yang Anda lakukan dalam pemilu calon legislative tahun 2017 yang lalu?
- a. Tidak ada.
  - b. Ikut mensosialisasikan program KPU, tapi tidak memilih.
  - c. Ikut mendengarkan sosialisasi para calon dan pendukungnya, tapi tidak memilih.
  - d. Ikut sebagai tim sukses (kampanye/sosialisasi), tapi tidak memilih.
  - f. Ikut menyumbang dana kampanye calon legislative, tapi tidak memilih.
  - g. Ikut mensosialisasikan dan mengajak untuk menjadi golongan putih (tidak memilih).
9. Menurut Anda, apakah sosialisasi KPU sudah cukup memberikan informasi ke masyarakat?
- a. Sudah
  - b. Belum.

